

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN



2017

DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl. Raya Soreang KM. 17 Telp. (022) 5893660 Soreang 40911

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017 sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja dinas dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 yang merupakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 -2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2016 – 2021.

Dari semua program dan kegiatan diatas, tergambaran fokus Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah tetap pada pelayanan kepada masyarakat pada umumnya. Terlepas dari masih adanya kelemahan dan hambatan, namun kiranya semoga laporan ini dapat merupakan perwujudan dari Kinerja Dinas selama tahun 2017 yang pada tahun mendatang selalu akan ditingkatkan.



Soreang, Januari 2018
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN




ERWIN RINALDI, M.Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671110 199303 1 012

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahanan ini merupakan implementasi program-program guna mencapai Tujuan dan Sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bandung. Sesuai dengan Rencana Strategis tahun 2016 - 2021, visi Pemerintah Kabupaten Bandung adalah “**Memantapkan Kabupaten Bandung Yang Maju, Mandiri Dan Berdaya Saing, Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural Dan Berwawasan Lingkungan**”

Ditinjau dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahanan keterkaitan langsung menggembankan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 adalah Misi 3 yaitu :”**Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terpadu** Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas. Tujuan dan sasaran tersebut tertuang dalam Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahanan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung. Penetapan Kinerja yang merupakan indikator dinas tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut:

**TARGET DAN REALISASI PENETAPAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERTUMKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target tahun 2017	Realisasi tahun 2017	Capaian	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
Meningkatnya kualitas lingkungan pertumbuhan permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	85.96%	92.74%	107,86%	Program Pengembangan Perumahan	16.991.531.000,00	16.877.612.355,00	99,33%
	Persentase lingkungan yang di dukung oleh Sarana Prasarana Umum yang memadai	92,4%	92,50%	100,11%	Program Pengembangan Perumahan	32.829.193.014,00	31.476.755.720,00	95,89%
					Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	400.000.000,00	381.008.930,00	96,25%
	Persentase Rumah yang memiliki akses terhadap Air Bersih	76,34%	77,12%	101,02%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	24.053.970.004,00	23.393.797.224,00	97,25%
Meningkatnya akses terhadap Prasarana dan Sarana dan Utility Umum	Persentase Luas Kawasan Kumuh	0,59%	0,68%	110,17%	Program Pengembangan Perumahan Komunitas Perumahan	227.000.000,00	225.970.000,00	99,55%
					Program Pengembangan Perumahan Sehat Perumahan	6.000.000.000,00	5.705.474.800,00	95,09%
	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Sanitasi	75,00%	70,51%	94,01%	Program Pengembangan Perumahan Sehat Perumahan	189.760.000,00	189.467.900,00	94,85%
Meningkatnya Tingkat Administrasi dan Tata Kelola Pertahanan	Persentase Tanah Pemerintahan Daerah yang sudah bersertifikat.	10%	6,08%	60,90%	Program Pengembangan Barang Milik Daerah	104.015.819,00	96.811.000,00	93,07%
					Program Penataan penggunaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah	136.200.000,00	131.874.500,00	96,82%
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Taman sebagai Publik dan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Taman yang layak sebagai Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau	20,00%	19,35%	96,75%	Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)	16.336.119.705,00	15.528.380.502,00	95,05%
	Nilai SAKIP	B(70,00)	BB(73,30)	104,71%	Program penyelesaian area pemukiman	468.127.450,00	468.127.450,00	66,68%
Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Rakyat, Kawasan Pertumbuhan dan Pertanian					Program Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.434.829.665,00	1.384.700.493,00	96,51%
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	149.000.000,00	147.856.000,00	99,23%
					Program pengikatan disiplin aparatur	48.520.000,00	48.020.000,00	98,97%
					Program pengembangan data/informasi	59.858.000,00	59.638.000,00	97,64%
					Program pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	170.211.696,00	157.746.000,00	92,68%
					Program pengembangan Perumahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100%
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.318.010.000,00	3.187.663.954,00	96,07%
					JUMLAH	-	114.976.320.617,00	110.789.373.043,00

Dapat di jabarkan bahwa anggaran atau keuangan yang mendukung terhadap Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah 16 Program sebesar Rp. 114.976.320.617,00,00 terealisasi sebesar Rp. 110.789.373.043,00 atau **96,36%**, dengan persentase capaian kinerja tiap indikator sasaran adalah **97,27%**. Sedangkan pada Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan pertanahan dari keseluruhan anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Rp. 128.454.090.689,00, terealisasi sebesar Rp. 118.759.331.110,00 dengan capaian **92,45%**.

Tingkat keberhasilan dari 7 indikator kinerja utama (IKU) dan 2 Indikator Kinerja Wajib Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kab. Bandung serta Renstra Dinas, dapat disimpulkan hasil penilaian adalah sebagai berikut :

1. Indikator capaian kinerja di atas target yang ditetapkan, sebanyak 5 indikator kinerja;
2. Indikator capaian kinerja sesuai target yang ditetapkan, sebanyak 1 indikator kinerja;
3. Indikator capaian kinerja di bawah target yang ditetapkan, sebanyak 3 indikator kinerja;

Di dalam analisis diuraikan mengenai hambatan-hambatan untuk kegiatan yang tidak mencapai sasaran. Hal ini sebagai tindakan korektif untuk pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang. Secara umum dapat dikemukakan bahwa hambatan dan kendala berasal dari faktor internal dan eksternal yang menyengkut sumber daya, baik masyarakat maupun karyawan, dana dan sarana/prasarana untuk kegiatan kedinisan.

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

